

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004-2007**

Andriana

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

This research intends to empirically test the direct effect between Regional Real/Own Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) towards Capital Expenses at the Regency/Municipality of Central Java Province. Sample in this research is overall Regencies and Municipalities located in Central Java from the year of 2004 to 2007. The sample used based on the Regional Revenue and Expense Budget (APBD) of regency/municipality regional government that had been used the new format that is Law of the Internal Affairs Minister Decree No. 29 year 2002. Data analyzed by using multiple regressions technique with analysis path model and e-views. Based on the research result using multiple regressions, gained the first Hypothesis result that is Regional Real/Own Revenue negatively affects Capital Expenses. Second Hypothesis shows that General Allocation Fund positively affects Capital Expenses.

Keyword: Regional Real/Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenses.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru yaitu era desentralisasi hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang *Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Yang kini telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah daerah ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan diberbagai sektor sangat diharapkan pada era

desentralisasi terutama sektor publik, hal ini ditunjukkan dengan adanya pergeseran komposisi belanja sebagai upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan belanja modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Implikasi langsung atas implementasi kemandirian daerah yaitu kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi DAU dalam beberapa tahun berjalan terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan belanja Modal guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini menguji pengaruh PAD, DAU terhadap belanja modal pada kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Otonomi Dan Sistem Desentralisasi

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbarui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua ini mengatur tentang *Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Yang kini telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Menurut Ibnu Syamsi (1994), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005) adalah

penyerahan urusan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

2.2 Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat dari persoalan kemampuan keuangan. Dalam hal alokasi sumber keuangan daerah, maka yang merupakan pokok persoalan adalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Ibnu Syamsi 1994). Umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan.

Kebijakan keuangan daerah itu tercermin pada kebijaksanaan fiskal atau anggaran daerah. Tujuan utama kebijaksanaan fiskal ada tiga, yaitu:

- a. Menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya. Ini berarti, dengan kebijaksanaan fiskal akan diusahakan seoptimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada pada daerah itu dapat direalisasi.
- b. Untuk mengusahakan terbukanya kesempatan.
- c. Mengusahakan agar harga berada dalam tingkat yang wajar dan selalu dalam keadaan stabil, sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan.

Karena anggaran daerah merupakan realisasi kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam pembangunan, maka kebijaksanaan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah haruslah selalu meningkat, sedangkan pengeluaran haruslah dilakukan seefisien mungkin. Seluruh proses anggaran harus terkoordinasi dengan rapi, sehingga mampu untuk membiayai pembangunan (disamping membiayai kebutuhan rutin). Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan pemerintah daerah sehemat mungkin. Melalui anggaran daerah dapat dilakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana, sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Pada dasarnya ada tiga sumber pendanaan kemampuan daerah (pendapatan daerah), yaitu *locally raised revenue* (Pendapatan Asli Daerah), *transferred or assigned income* (dana transfer dari pemerintah atasan), dan *loans* (pinjaman) (Muluk, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerahnya, termasuk dalam Pendapatan Asli

Daerah (PAD), adalah Pajak Daerah yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir/swasta ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah,

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

2.5 Belanja Modal

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (Syukriy Abdullah, 2006), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Menurut Munir (Syukriy Abdullah, 2006), juga menyatakan hal yang sama. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Syukriy Abdullah, 2006).

2.6 Hipotesis Penelitian

a. Hubungan Antara PAD Dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana utama pemerintah daerah yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, sehingga perubahan PAD akan berpengaruh terhadap belanja. Dalam pencapaian kemandirian daerah pemerintah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor. Dengan adanya desentralisasi fiskal saat ini diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor publik maka pengalokasian Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah harus tepat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Albatel (2000) menyatakan bahwa perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran Belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2007.

b. Hubungan Antara DAU dengan Belanja Modal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Hari Adi, 2007). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.

Menurut penelitian Holtz-Eakin et al (Hari Adi, 2007) menyatakan terhadap keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang telah dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) menemukan bukti empiris dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran

belanja modal. Gamkha dan Oates (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Syukriy dan Halim (2004) menyatakkan bahwa DAU tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun berjalan kabupaten/kota di Jawa-Bali. Hal ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian maimunah (2006) yang melakukan penelitian di kabupaten/kota di pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran Belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2007

3. MODEL PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Sampel dalam penelitian ini yaitu kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sampel ini atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah menggunakan format baru yaitu Peraturan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 Kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari realisasi APBD yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://www.djpkpd.or.id>) tahun anggaran 2004-2007 serta Laporan PDRB tahun 2003-2007 propinsi dan kabupaten/kota Jawa Tengah. Ketiadaan data untuk tahun 2003 karena beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah belum siap untuk menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

3.2 Devinisi Operasional Variabel Penelitian.

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Sedangkan Variabel dependen yaitu Belanja Modal.

3.3 Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian:

$$BM = \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + e_1 \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

4. ANALISIS HASIL

4.1 Pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal (BM) dengan nilai koefisien beta yang di peroleh sebesar -0.203977 dan nilai t = -9.392257 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% secara statistik dapat dinyatakan bahwa PAD

berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Meskipun secara statistik hasil ini signifikan akan tetapi koefisien yang diperoleh menunjukkan tanda negatif sehingga **hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama (H_1)** yang menyatakan: **PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

Hasil ini sesuai dengan temuan Abdullah dan Halim (2004) bahwa sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja daerah secara keseluruhan. Dilihat dari nilai koefisien beta sebesar -0.203977 pada variabel PAD sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah negatif. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana seharusnya terdapat hubungan positif antara PAD dengan BM. Kondisi ini mengandung arti bahwa setiap ada peningkatan 1 satuan PAD akan menyebabkan penurunan BM sebesar 0,203977 pada daerah sampel. Sehingga untuk Kabupaten/Kota provinsi Jawa tengah pada tahun 2004 hingga 2007 setiap kenaikan PAD akan menurunkan BM pelayanan publik.

4.2 Pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal (BM) dengan nilai koefisien beta yang di peroleh sebesar 0.251504 dan nilai $t = 20.42991$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% secara statistik dapat dinyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini **mendukung hipotesis yang kedua (H_2)** yang menyatakan: **DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

Hasil ini sesuai dengan penelitian Holtz-Eakin et al (Hari Adi, 2007) menyatakan terhadap keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang telah dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) (Dalam Hari Adi, 2007) juga menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Dilihat dari nilai koefisien beta sebesar 0,251504 pada variabel DAU sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan DAU terhadap Belanja Modal adalah positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa setiap ada penambahan 1 satuan DAU akan menyebabkan kenaikan pada BM sebesar 0,251504 pada daerah sampel. Sehingga untuk Kabupaten/Kota provinsi Jawa tengah pada tahun 2004 hingga 2007 setiap kenaikan DAU akan menaikkan BM pelayanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tidak mendukung Hipotesis kesatu. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

5.2 Saran

Berikut saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dari tahun 2001 sehingga dapat melihat kondisi pertumbuhan ekonomi serta pengalokasian dana sejak dimulainya di tetapkan otonomi daerah
2. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan wawancara secara langsung ke pemerintah daerah guna melihat bagaimana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul, 2006, *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2.
- Albatel, Abdullah H, 2000, *The relation between government expenditure and economic growth in Saudi Arabia*, J. King saud Univercity, vol 12, pp 173-193.
- Adi, Priyo Hari, 2006, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Adi, Priyo Hari, 2007, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Bana, Yahya M, 1999, "Analisis sistem pengelolaan keuangan daerah kabupaten lor propinsi Nusatenggara Timur", Tesis MEP, UGM, Tidak dipublikasi.
- Bland, Robert L and Nunn, Samuel, 1992, *The Impact of capital spending on municipl operating budgets*. Public Budgeting and finance, summer 1992.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Cashin, Paul, 1995, *Government spending, taxes, and economic growth*. IMF staff paper. Vol.42.
- Gamkhr, Shama and Oates, Wallace. 1996. Asymmetries in the response to increases in intergovernmental grants:some empirical findings. National Tax Journal vol. XLIX no 4. 1996.
- Ghozali, Imam, 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat, BP UNDIP, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2008, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, Edisi Kedua, BP UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Seri Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Seri Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, PT. Salemba Empat, Jakarta.

- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2008, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harianto, David dan Adi, Priyo Hari, 2007. *Hubungan antara dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per kapital*, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Holtz-Eakin, Douglas, et al, 1985. *Implementing Causality tests with panel data, with an example from local public finance*, NBER Technical Paper series.
- Ibnu Syamsi, 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jogiyanto, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. Ph.D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga
- Krisharianto, Josef dan Hartono, Djoni, 2007, *Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment*, UI – Depok, Jakarta.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya*, CURES Working Paper No. 05/01.
- Legrenzi, Gabriella and Milas, Costas, 2001, *Non linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: some evidence from the italian municipalities*, Istituto di scienze economiche e statistiche, Università degli studi di Milano.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX : K-ASPP04 Hal 1-27. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mindarti, Lely Indah, 2008, *Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD dan Demokrasi Lokal*, Unibraw – Malang.
- Muluk, Khairul, 2007, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Edisi Pertama, Banyumedia Publishing dan Center for Indonesian Reform, Malang.
- Ndadari, Wulan Laras dan Adi, Priyo Hari, 2008, *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat*, The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Sialllagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud. 2006. *Meknisme Corporate Governance, kualitas laba dan nilai perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogjakarta.
- Sugiyono, 2008, *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*, Cetakan Keenam, CV. Alfabeta, Bandung.
- Syaiful. 2006. *Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Ulum, Ihyaul, 2005, *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, UMM Press, Malang.
- Waluyo, Joko, 2007, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*, UI-Depok, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah*.
- [www. BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)
- www. Bi.go.id
- www. Dpjk.depkeu.go.id